**MANAJEMEN KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM MENGATASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PERKOTAAN**

Oleh :

M. Yoga Pratama (2156041040)

UTS Manajemen Strategis

**Pendahuluan**

Permasalahan sampah di perkotaan merupakan permasalahan serius yang dirasakan oleh masyarakat karena volumenya yang semakin meningkat atau meningkat sedangkan kapasitas respon aparat pemerintah sangat terbatas. Lebih lanjut, tren ini juga diperkuat oleh kecenderungan masyarakat modern yang banyak menghasilkan berbagai jenis sampah, terutama sampah yang berkaitan dengan gaya hidup penduduk kota-kota besar. Permasalahan sampah saat ini menjadi permasalahan yang cukup memprihatinkan di kota-kota besar di Indonesia dan perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dunia. “Pada tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia mencapai 261,89 juta jiwa, naik dari 206,26 juta jiwa pada tahun 2000.” Pada tahun berikutnya, beliau mengatakan: “Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 266,79 juta jiwa”, dan pada tahun ini, menurut Databoks, “Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 266,91 jiwa.” Satu Juta Orang”, ketiga data ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat secara otomatis akan berdampak pada tersedianya ruang bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan maka tingkat keinginan manusia terhadap sesuatu pun semakin meningkat. Dengan kondisi seperti ini, pola konsumeris individu terhadap suatu hal secara umum akan berdampak pada jumlah sampah yang dihasilkan yang dijamin akan terus meningkat setiap tahunnya. “Pada tahun 2019, Indonesia mencatat sampah yang dihasilkan antara 66 hingga 67 juta ton, dimana mayoritas jenis sampah yang dihasilkan adalah sampah organik sebesar 60% dan sampah plastik, kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 15% Permasalahan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari dan harus ditangani secara cepat dan tegas karena akan berdampak pada kehidupan manusia, khususnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Berangkat dari fenomena di atas, mengingat keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana pemerintah serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengolahan sampah pada waktu-waktu tertentu, maka permasalahan penimbunan dan pengelolaan sampah bukanlah permasalahan yang bisa dianggap remeh. Sebuah kesimpulan dapat ditarik. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan swasta sangat diperlukan.

**A. Pengertian sampah**

Sampah atau Waste (Bahasa Inggris) mempunyai banyak arti dalam ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya sampah adalah bahan yang dibuang atau dibuang pada sumbernya, akibat kegiatan manusia atau alam, yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Limbah dapat ditemukan di semua tahap materi: padat, cair atau gas.

Secara sederhana, jenis sampah dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang berasal dari organisme hidup, seperti dedaunan dan sisa-sisa dapur. Sampah jenis ini sangat mudah terurai. Sedangkan sampah anorganik dan sampah kering sulit terurai. Karet, plastik, kaleng dan logam merupakan bagian dari sampah kering.

Secara lebih spesifik, sampah dibagi menjadi:

1. Human Erecta

Human Electa adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada produk limbah yang dikeluarkan oleh tubuh manusia melalui proses pencernaan. Kotoran (feses) dan urin (urin) adalah hasilnya. Kotoran manusia dapat menimbulkan bahaya kesehatan karena dapat membawa penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus.

2. Sewage/Limbah

Limbah tersebut meliputi air limbah domestik dan air limbah industri. Limbah cair rumah tangga, termasuk air mandi, limbah cucian, dan limbah dapur, seringkali dibuang ke saluran pembuangan tanpa penyaringan. Sementara itu, limbah pabrik memerlukan pengolahan khusus sebelum dibuang ke alam agar lebih aman. Namun tidak jarang limbah berbahaya ini mengalir ke sungai dan lautan tanpa adanya penyaringan.

3. refuse

refuse diartikan sebagai sampah yang dihasilkan dari proses industri atau hasil samping kegiatan rumah tangga. Sampah inilah yang disebut dengan sampah dalam pengertian sehari-hari masyarakat oleh banyak orang. Sampah ini dibedakan menjadi sampah (sampah busuk) dan sampah (sampah yang tidak dapat terurai, sampah yang tidak dapat terurai). Sampah yang mudah rusak merupakan produk sampingan dari operasi pasar makanan, seperti sampah rumah tangga (household waste) atau sayuran. Sedangkan sampah yang tidak diolah adalah sampah yang tidak membusuk seperti mika, kaca, dan plastik. Sampah yang tidak mudah rusak adalah sampah yang sangat mudah terurai secara hayati namun dapat terurai secara alami dalam jangka waktu yang lama.

**B. Kemitraan Pemerintah dan Swasta Terkait Pengelolaan**

Menurut Darwin dkk. (2009:3), perlu ditekankan bahwa istilah “kolaborasi” tidak berarti bekerja sama. Sederhananya, “kerja sama” berarti “tujuan yang sama”, sedangkan “kerja sama” tidak berarti “tujuan yang sama”. Seiring dengan semakin kompleksnya peradaban manusia, kebutuhan pun semakin meningkat sehingga memerlukan bentuk kerja sama yang lebih besar dan ekspansif. Beberapa bentuk manajemen diperlukan untuk mengatur kegiatan dan memastikan penggunaan sumber daya secara efektif seperti sumber daya manusia, persediaan, dan peralatan serta mencapai tujuan yang optimal. Bentuk manajemen ini disebut manajemen. Semakin besar dan ekstensif kerjasama yang dilakukan, maka diperlukan bentuk tata kelola yang lebih mendesak dan lengkap. Hal ini dikarenakan semakin besar dan luas bentuk kerjasama maka semakin besar jumlah sumber daya yang dibutuhkan, dan semakin besar pula dampak negatif jika terjadi kesalahan. pengelolaan. Jadi peran penting ‘manajemen’ terletak di sini. Hubungan pemerintah, swasta dan masyarakat saling berhubungan dan konsisten dengan kerjasama. Kolaborasi merupakan wadah dimana para pemangku kepentingan saling terhubung untuk berpikir bersama mencari solusi atas permasalahan yang kompleks, seperti upaya mengurangi penumpukan sampah di Kota Magelen, dimana peran pemerintah serta swasta dan sebagai “aktor” adalah masyarakat setempat. , berbohong. Diperlukan. “Penghasil sampah”.

**C. Kemitraan Antar Daerah Terkait Pengelolaan**

Kerjasama antar pemerintah daerah menjadi sebuah permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah saat ini, mengingat peran Pemerintah dalam menentukan ketahanan negara serta banyaknya permasalahan dan kebutuhan masyarakat lokal yang perlu diselesaikan. atau bertemu di persimpangan. . Batas wilayah administratif. Bahkan kita mengenal batas administratif (berdasarkan ketentuan hukum) dan batas fungsional wilayah (berdasarkan hubungan sosial ekonomi antar batas administratif). Setiap daerah mempunyai batas administratif yang ditetapkan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya sering muncul permasalahan dan kepentingan yang berbeda-beda akibat perubahan hubungan fungsional sektor sosial ekonomi melalui batas administratif wilayah tersebut. Dalam konteks ini, alasan utama perlunya kerjasama antar pemerintah daerah adalah untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang berbeda antar wilayah administratif dan sebaliknya untuk memanfaatkan potensi permasalahan yang berbeda-beda untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kapasitas organisasi mikro Pemerintah perlu dilakukan reformasi di tingkat daerah. Hal ini merupakan bentuk reformasi manajemen publik yang perlu mendapat perhatian Pemerintah saat ini, dan sekaligus meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi tersebut. organisasi di tingkat regional. .center (lihat Polit & Bouckaert, 2000:sepuluh). Dengan kata lain, penguatan kapasitas lembaga-lembaga pemerintah pusat sangatlah penting.

Alasan lain mengapa kerjasama antar pemerintah daerah diperlukan adalah sebagai berikut (Tarigan, 2009).

1. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat mencapai kekuasaan yang lebih besar. Kerja sama antar pemerintah daerah memungkinkan kekuatan masing-masing daerah untuk bersinergi meningkatkan sinergi dalam mengatasi ancaman atau permasalahan lingkungan hidup yang kompleks dibandingkan menyelesaikannya secara janggal. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

2. Pihak yang bekerja sama dapat mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Melalui kerja sama, setiap daerah akan melakukan transfer intelijen, teknologi, dan informasi. Misalnya suatu daerah belajar dari kelebihan dan keahlian daerah lain. Masing-masing bidang akan berkembang atau berupaya untuk berkembang berdasarkan hasil pembelajaran secara keseluruhan.

3. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat mempunyai kekuasaan yang lebih besar. Dengan bekerja sama, masing-masing wilayah yang terkena dampak akan memiliki posisi negosiasi yang lebih baik atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya di hadapan struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Jika suatu daerah berjuang secara mandiri demi kepentingannya sendiri, mungkin perhatiannya akan berkurang, namun jika ikut serta dalam forum kerja sama regional, suaranya akan lebih mendapat perhatian.

4. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat mengurangi atau mencegah konflik. Melalui kerja sama, daerah-daerah yang sebelumnya sangat kompetitif atau penuh konflik dapat menjadi lebih toleran dan berupaya mengambil manfaat atau belajar dari konflik.

5. Masing-masing pihak merasa lebih adil. Setiap daerah tidak akan merasa dirugikan karena adanya kemitraan yang transparan. Setiap daerah yang berpartisipasi dalam kerjasama mempunyai akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan.

**Kesimpulan**

Pertambahan jumlah penduduk akan mengancam peningkatan timbulan sampah sehingga sulit mengendalikan pelaksanaan pengelolaan penimbunan sampah. Di sisi lain apabila Makin besar dan luas kerjasama tersebut, maka semakin urgen dan complete pula bentuk pengelolaan yang diperlukan, karena semakin besar dan luas bentuk kerjasamanya maka jelas memerlukan sumber daya yang semakin besar pula, sehingga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar jika terjadi kesalahan dalam pengelolaannya. Di mana kolaborasi menghubungkan para stakeholder untuk saling bekerja sama memikirkan solusi atas permasalahan yang kompleks seperti contohnya upaya pengurangan penumpukan sampah pada Kota Magelang yang memerlukan peran bukan hanya dari pemerintah saja namun juga swasta, dan masarakat yang menjadi "produsen" sampah tersebut. Kerjasama Antar Daerah Kerja sama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat in mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ridho, H. (2022). MEBIDANGRO: Kerja Sama dalam Pengolahan Sampah Perkotaan. Jejak Pustaka.

Ps, T. P. (2008). Penanganan dan pengolahan sampah. Penebar Swadaya Grup.

Habibah, E. N., Sos, S., & Rumah, P. P. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.

Oktavia, R. S., & Harahap, T. K. (2016). Manajemen Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mengelola Penumpukan Sampah di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).

Annisa Himmah, W., Haris, I., Veronica, S., Maryorie Dagna, T., Wahyu Nur, F. P., Muhammad Albert, D., ... & Bobbi Fadhillah, F. L. EFEKTIVITAS BANK SAMPAH SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAM LINGKUNGAN.